



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2017



KEGIATAN BONGKAR MUAT DI DERMAGA LOKAL
TANJUNG REDEB JI.PULAU DERAWAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Karunia-Nya **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)** Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 ini dapat disusun. **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** Dinas Perhubungan Kabupaten Berau disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun mengacu pada Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja dan Pelaporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Laporan ini memuat hal-hal pokok tentang pelaksanaan kegiatan dan hasilnya maupun masalah yang dihadapi serta upaya tindak lanjut yang telah ditempuh, yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2016-2021). Tahun 2016 merupakan tahun transisi kepemimpinan di Kabupaten Berau, pada awal tahun anggaran RPJMD periode 2016 – 2021 belum ditetapkan, penetapan dilakukan sekitar bulan Agustus/September sehingga dalam penyusunan LKj-IP ini masih mengacu pada RENSTRA TEKNOKRATIK 2016-2020. Sementara RENSTRA SKPD dalam proses penetapan dan penyesuaian dengan Visi Misi Bupati terpilih.

Dengan penyusunan ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tanjung Redeb, 25 Februari 2019

KEPALA DINAS,

H. ABDURRAHMAN U, SE, M.Si

Nip. 19650202 198902 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2016 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Berau disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dan telah berhasil dicapai. Analisa ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2018 adalah berada pada tahun transisi kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Berau.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai pencapaian tahun pertama Renstra Periode 2016 -2021, dan kontribusinya untuk pencapaian target RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau pada tahun 2018 adalah baik.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan, Kabupaten Berau. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi teknis menimbulkan lemahnya kinerja secara umum, sehingga penyelesaian tugas-tugas di masing-masing bidang belum dapat maksimal.



Melalui Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis serta dapat menjadi indikator bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Berau berperan dalam mendukung pembangunan Daerah dan masyarakat Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, 25 Februari 2019

KEPALA DINAS,

H. ABDURRAHMAN U, SE, M.Si

Nip. 19650202 198902 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I.1
B. Dasar Hukum	I.1
C. Maksud dan Tujuan	I.2
D. Gambaran Umum	I.3
SKPD	
E. Sistematika Penulisan.....	I.7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja.....	II.1
B. Rencana Strategis	II.3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja SKPD.....	III.1
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III.5
C. Realisasi Keuangan.....	III.18
D. Capaian Prestasi & Penghargaan	III.24
BAB IV PENUTUP	
	IV.1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan	I.7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	II.2
Tabel 2.2 Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan,	II.4
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan,	II.5
Tabel 2.4 Penentuan Indikator Kinerja Sasaran	II.6
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama	II.7
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	III.1
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016	III.2
Tabel 3.3 Pencapaian IKU Tahun 2016	III.4
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1	III.5
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran 2	III.7
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran 3	III.9
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Sasaran 4	III.12
Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Sasaran 5	III.13
Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Sasaran 6	III.19
Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Sasaran 7	III.21
Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Sasaran 8	III.22
Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Sasaran 9	III.24
Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran TA.2016	III.26
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2016 s/d 2021	III.31
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 s/d 2021	III.32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	I.5
Gambar 1.2 Grafik SDM Berdasarkan Pendidikan	I.6
Gambar 1.3 Grafik SDM Menurut Golongan	I.7
Gambar 2.1 Siklus SAKIP	II.4
Gambar 3.1 Kegiatan Diklat di Balai Diklat BP2TD Palembang	III.6
Gambar 3.2 Kendaraan Perbaikan APILL	III.8
Gambar 3.3 Proses Pengujian Kendaraan Bermotor	III.9
Gambar 3.4 Kegiatan Razia Bersama	III.10
Gambar 3.5 Kegiatan Pelayanan Bongkat Muat di Dermaga Lokal	III.11
Gambar 3.6 Dokumentasi Pembangunan Dermaga Kampung Semurut	III.14
Gambar 3.7 Dokumentasi Pembangunan Pelabuhan Batu putih	III.14
Gambar 3.8 Dermaga Apung Kelurahan Sambaliung	III.15
Gambar 3.9 UPTD Dermaga Lokal Jl. Pulau Derawan	III.16
Gambar 3.10 Dermaga Ketinting Rt.03 Kelurahan Gunung Tabur	III.16
Gambar 3.11 Dermaga Kampung Batu-Batu	III.16
Gambar 3.12 Dermaga Maratua	III.17
Gambar 3.13 Dermaga Rinding	III.18
Gambar 3.14 Landasan Bandara Maratua	III.20
Gambar 3.15 Jenis Jenis Rambu Lalu lintas	III.21
Gambar 3.16 Zoss, Marka jalan	III.22
Gambar 3.17 Preview Website Dinas Perhubungan, Kominfo	III.23
Gambar 3.18 Preview Dialog Interaktif Dinas Perhubungan, Kominfo Th.2015	III.23
Gambar 3.19 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Retribusi 2011 s/d 2015	III.25
Gambar 3.20 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2011 s/d 2015	III.31
Gambar 3.21 Plakat WTN	III.33



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media/wahana pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal ini SKPD atau yang saat ini dikenal dengan OPD. Untuk itu Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2018 ini secara garis besarnya berisi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKj-IP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam proses penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKi-IP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKi-IP Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2017 adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66),(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan

Tahun 2018 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke-3 (Tiga) dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKj-IP Dinas Perhubungan Kabupaten Berau merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj-IP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lebih spesifik berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tujuan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate (BUPATI BERAU) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau untuk meningkatkan kinerjanya.



3. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau selama Tahun Anggaran 2018;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggung jawabkan).

D. GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/OPD

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau adalah Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.

Dinas Perhubungan Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2018 Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

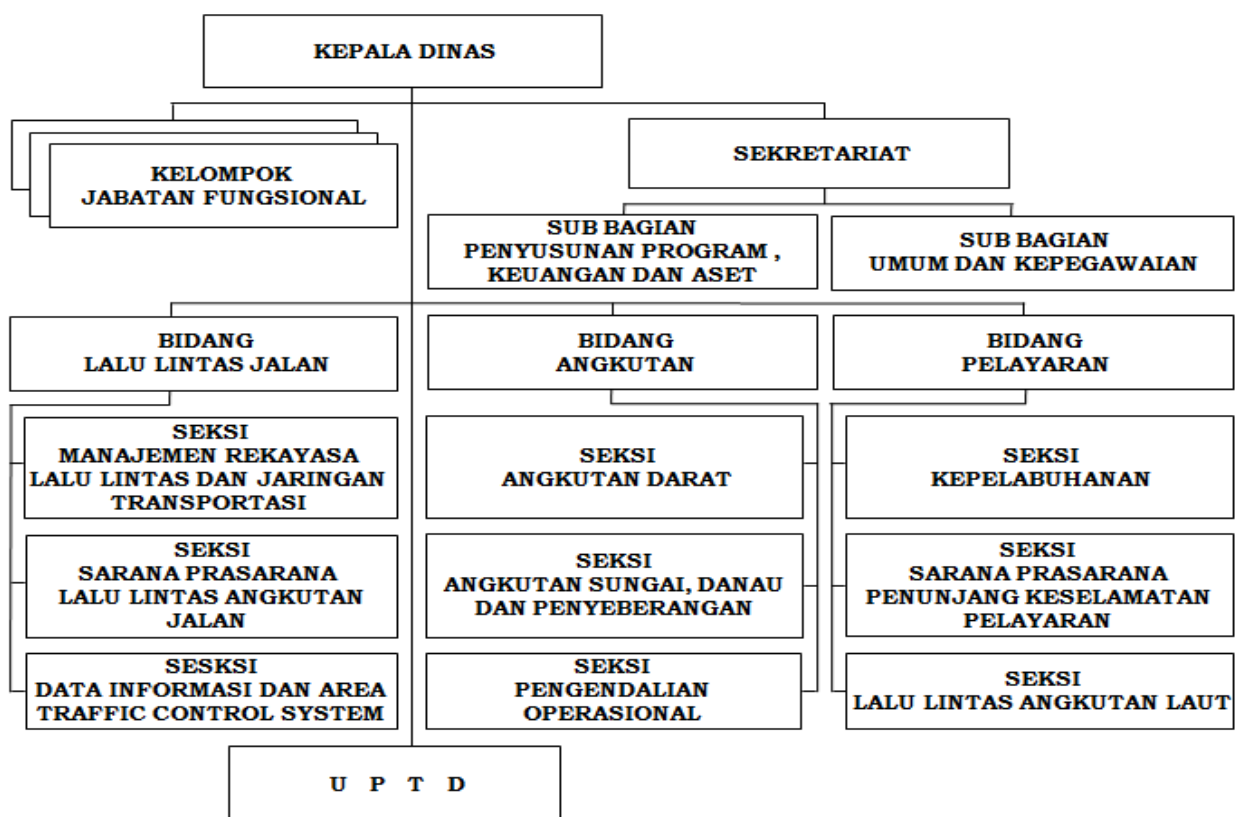
3. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Berau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Berau Nomor 63 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi
 - b. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - c. Seksi Data Informasi dan Area Traffic Control System

4. Bidang Angkutan, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Darat;
 - b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional Seksi Penunjang Keselamatan, Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pelayaran, membawahi :
 - a. Seksi Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Penunjang Pelayaran;
 - c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD (Diatur dengan Perbub)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

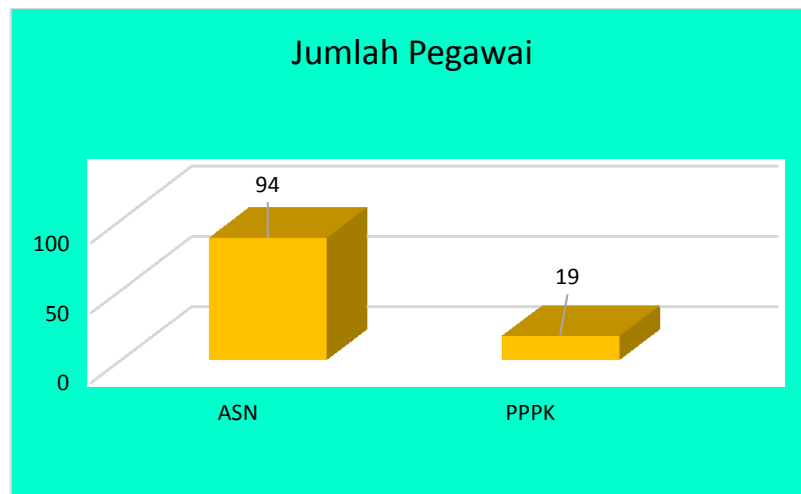


1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data aparatur sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau berdasarkan jenis kelamin, jabatan, pendidikan, pangkat/golongan.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai



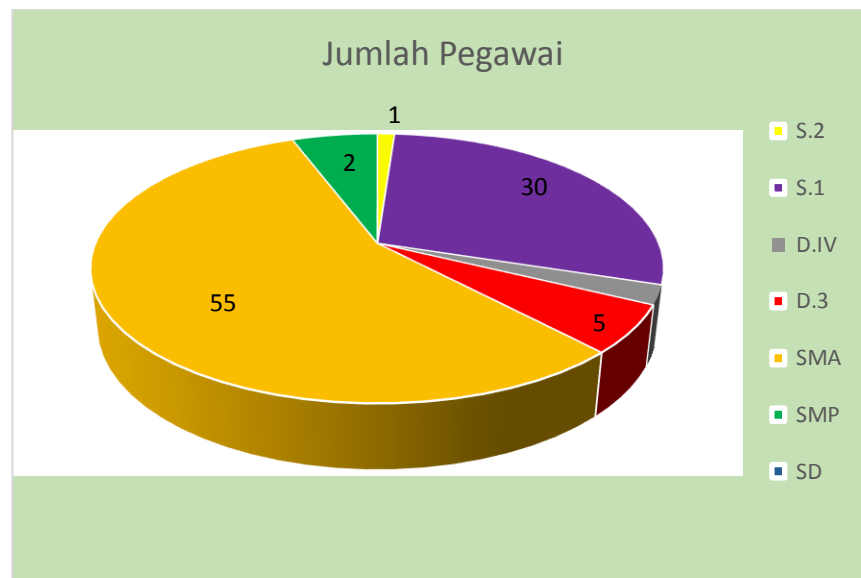
Total jumlah pegawai 113 (Seratus Tiga Belas) orang.

➤ Pendidikan

Dinas Perhubungan Kabupaten Berau sampai dengan bulan Januari tahun 2018 memiliki sumber daya manusia (aparatur) sebanyak 113 (Seratus Tiga Belas) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang pejabat struktural, 74 (tujuh puluh empat) orang staf pelaksana yang berstatus ASN dan 19 (Sembilan belas) orang staf pelaksana yang berstatus PTT non data base/tenaga atau kontrak dengan berbagai macam Latar Belakang Pendidikan. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dirangking menurut tingkat pendidikan/latar belakang pendidikan maka pendidikan SMA menduduki urutan kesatu dengan jumlah 55 orang dan urutan kedua adalah S1 yaitu sebanyak 30 orang dan urutan ketiga adalah D3 5 orang dan SLTP sebanyak masing-masing 2 orang, kemudian urutan keempat adalah S2 sebanyak 1 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik Rekapitulasi Pendidikan Aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2018 sebagai berikut :

Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan, sedangkan dari segi pendidikan kurang merata komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana, termasuk kualifikasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan bidang Perhubungan.

➤ Golongan dan Esselon

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai Desember 2018 ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau yang memiliki golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 38 orang, golongan II sebanyak 62 orang dan golongan I sebanyak 0

Berikut ini disampaikan tabel rekapitulasi golongan dan esseloning PNS di lingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan golongan :

TABEL 1.1
SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BERAU MENURUT GOLONGAN TAHUN 2018

NO	JABATAN	JUMLAH GOLONGAN PNS TAHUN 2017				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	3	-	-	-	3
4	Kasi/Kasubbag		13	-	-	13
5	Staf	-	20	62		82
JUMLAH TOTAL		5	33	62	0	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan



➤ **Sarana & Prasarana**

Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana tanah, bangunan kantor, dan ruangan kerja. Selain itu terdapat pula sarana berupa kendaraan Dinas, meja, kursi, lemari, komputer, alat komunikasi, televisi, mesin tik, kalkulator, mesin foto copy dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi rusak. Namun diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau memiliki perlengkapan berupa kantor UPT dermaga dan gedung pengujian dan alat uji kendaraan bermotor, kendaraan dinas dan wasdal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah/OPD, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat daerah serta sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang mendasarkan Pada dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 berdasarkan dokumen RENSTRA dan RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja SKPD/OPD serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dalam suatu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan public, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama SKPD/OPD, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan SKPD serta menggambarkan isu strategi yang sedang dihadapi SKPD.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD/OPD dengan tahun yang sama. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2018. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan SKPD/OPD di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2018 sebagai berikut:



VISI :

**TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DALAM BIDANG PERHUBUNGAN
DALAM MENDUKUNG VISI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

TABEL 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	Program Pelayanan Administrasi perkantoran.	6 Unit	6 Unit	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya ASN yang berkualitas dan memiliki kinerja yang tepat sasaran	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Keg	2 Keg	100%
3	Adanya Capaian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Setiap Tahun	Jumlah Laporan yang dibuat setiap tahunnya	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Dok	2 Dok	100%
4	Terwujudnya dan terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas dermaga di Kab Berau.	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan di Rehabilitasi	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	2 Keg	2 Keg	100%
5	Terwujudnya pemeliharaan dan rehabilitasi untuk fasilitas LLAJ	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan yang dapat ditingkatkan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ .	3 Keg	3 Keg	100%
6	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Adanya Peningkatan Pelayanan Angkutan kepada para pengguna angkutan di Kab.Berau	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	11 Keg	11 Keg	100%
7	Terwujudnya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan.	Adanya Fasilitas Perhubungan yang tercukupi dan dapat melayani jasa bidang perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2 Keg	2 Keg	100%

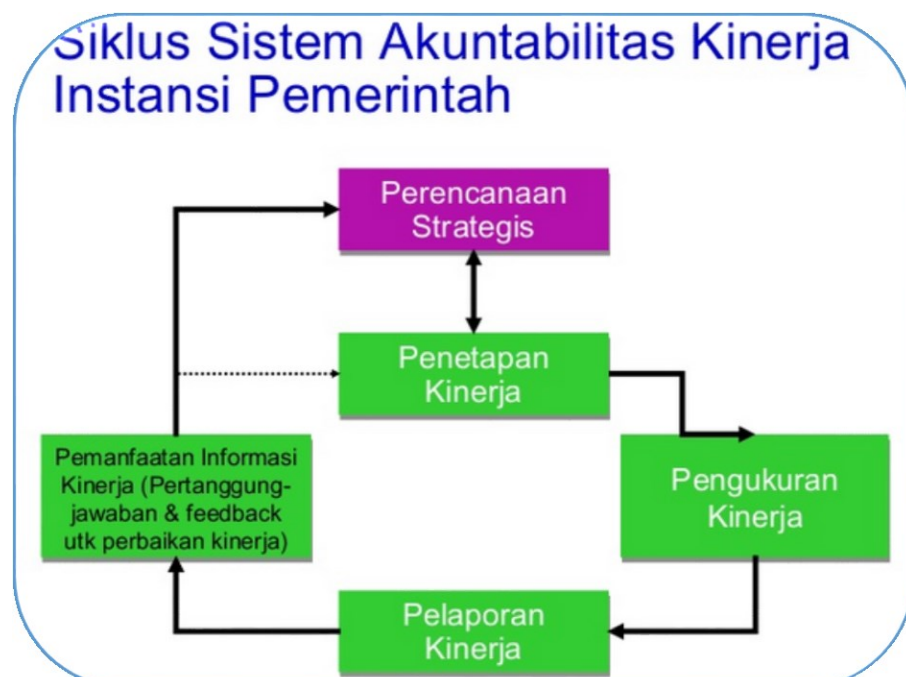
8	Terlaksananya keamanan dan ketertiban berlalu lintas	Terwujudnya pengamanan dan keamanan lalu lintas angkutan darat	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	2 Keg	100 %	100%
9	Terwujudnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kab,Berau	Adanya alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualitas standart yang dibutuhkan	Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor	5000 Kendaraan	6046 Jenis	100 %
10	Terwujudnya Pemeliharaan penerangan jalan umum di Kab.Berau	Terpenuhinya penerangan jalan umum di wilayah tanjung redeb	Program oprasional dan pemeliharaan ketanagalistrikan.	12 Bulan	12 Bln	100%
11	Terwujudnya peningjkatan sarana aparatur lalu lintas	Adanya peningkatan sarana aparatur lalu lintas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Keg	1 Keg	100%

Jumlah Anggaran Belanja Langsung tahun 2018 Rp. 18.503.057.000 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

B. RENCANA STRATEGIS

Dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seperti gambar dibawah, dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) SKPD/OPD, tahun 2018 sehingga Penetapan Kinerja (PK) mengacu pada RENSTRA SKPD dan hingga akhir tahun 2018 .

Gambar 2.1 Siklus SAKIP





Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau adalah :

**TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DALAM BIDANG PERHUBUNGAN DALAM
MENDUKUNG VISI PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

Penjelasan mengenai visi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Prima : maksudnya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan tanpa biaya tinggi
- b) Perhubungan : maksudnya kegiatan menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain baik melalui darat, laut udara.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan.
3. Menyediakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana perhubungan.
4. Meningkatkan PAD di bidang perhubungan.
5. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.

Tujuan Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemudahan aksesibilitas perhubungan, yang berkualitas bagi masyarakat
2. Memaksimalkan atau mengoptimalkan mutu layanan di bidang perhubungan,
3. Mewujudkan upaya-upaya peningkatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, yang mengacu pada misi dan tujuan. Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP setiap tahunnya. Indikator Kinerja bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perhubungan
Kabupaten Berau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan kemudahan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas bagi masyarakat	1. Terwujudnya sarana prasarana mobilisasi dan distribusi barang dan jasa yang memadai.	Sarana dan prasarana yang dibangun/ditingkatkan/direhab



		2. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Prosentase cakupan sarana dan prasarana perhubungan
2	Memaksimalkan atau mengoptimalkan mutu layanan di bidang perhubungan.	1. Terlatihnya sumber daya aparatur sesuai dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan	Kuatitas sumber daya aparatur yang terlatih sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan
		2. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan
		3. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Capaian pelayanan administrasi perkantoran
		4. Terwujudnya sarpras aparatur yang berkualitas dengan jumlah yang memadai.	Rasio cakupan sarpras aparatur terhadap jumlah layanan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun
		5. Terwujudnya kerjasama dengan media massa sesuai dengan kebutuhan.	Cakupan kerjasama dengan media massa
		6. Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang perhubungan	Cakupan kajian dan penelitian yang sudah dilaksanakan
		7. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM di bidang perhubungan	Cakupan peningkatan kualitas SDM di bidang perhubungan
		8. Terwujudnya tingkat kedisiplinan aparatur yang tinggi	Rasio kedisiplinan aparatur
3	Mewujudkan upaya-upaya peningkatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas.	Rasio Cakupan Pelayanan Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas
		2. Terwujudnya pembangunan sarpras perhubungan yang memadai.	Besaran rasio cakupan sarpras yang dibangun
		3. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas LLAJ	Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		4. Terwujudnya peningkatan kualitas untuk uji kelaikan kendaraan secara tepat.	Cakupan untuk melakukan uji kelaikam kendaraan
		5. Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan raya secara kontinyu	Frekwensi pengendalian dan pengamanan Lalu lintas dalam satu tahun

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga RENSTRA SKPD/OPD periode 2016-2021 dan RPJMD periode 2016 – 2021. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan berkewajiban mendukung program pembangunan daerah kabupaten Berau tahun 2016-2021.

Maka penetapan data awal perencanaan (tahun 2018) menjadi sangat penting. Berikut tabel program pembangunan daerah untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Berau.



TABEL 2.3

**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Daerah**

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		SKPD	
					2017	2021		
Misi I: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan								
Menyediakan infrastruktur yang berkualitas								
1	Meningkat nya aksesibilit as antar wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik	Peningkatan infrastruktur jalan desa dan kecamatan yang menghubungk an lokasi- lokasi ekonomi dan pariwisata	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah penumpa ng yang mengg unakan sarana transport asi umum	1,197,549	1,455,629	Dishub
2	Meningkat nya pertumbuh an ekonomi sektor pariwisata	Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk wisata	Pembangunan dan Pengembang an Wisata Bahari , wisata Alam, dan Wisata Perkotaan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Pelabuha n/Dermag a Penduku ng Sektor Wisata & Perekono mian (unit)	42	55	Dishub
				Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah kecamata n yang terlayani angkutan umum	10	13	Dishub



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SKPD

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Berau pada tahun 2018 telah dilakukan secara berkala (triwulan) , semester, dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Berau sebagai Dinas dengan Visi ***“Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Bidang Perhubungan dalam Mendukung Visi Pemerintah Daerah”***. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Berau tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

➤ Capaian Perjanjian Kinerja

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Berau selama tahun 2018 dengan dasar table diatas dapat diilustrasikan pada table berikut ini :



Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	Program Pelayanan Administrasi perkantoran.	6 Unit	6 Unit	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya ASN yang berkualitas dan memiliki kinerja yang tepat sasaran	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Keg	2 Keg	100%
3	Adanya Capaian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Setiap Tahun	Jumlah Laporan yang dibuat setiap tahunnya	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Dok	2 Dok	100%
4	Terwujudnya dan terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas dermaga di Kab Berau.	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan di Rehabilitasi	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	2 Keg	2 Keg	100%
5	Terwujudnya pemeliharaan dan rehabilitasi untuk fasilitas LLAJ	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan yang dapat ditingkatkan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ .	3 Keg	3 Keg	100%
6	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Adanya Peningkatan Pelayanan Angkutan kepada para pengguna angkutan di Kab.Berau	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	11 Keg	11 Keg	100%
7	Terwujudnya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan.	Adanya Fasilitas Perhubungan yang tercukupi dan dapat melayani jasa bidang perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2 Keg	2 Keg	100%
8	Terlaksananya keamanan dan ketertiban berlalu lintas	Terwujudnya pengamanan dan keamanan lalu lintas angkutan darat	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	2 Keg	2 Keg	100%



9	Terwujudnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kab,Berau	Adanya alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualitas standart yang dibutuhkan	Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor	5000 Kendaraan	6046 Jenis	100%
10	Terwujudnya Pemeliharaan penerangan jalan umum di Kab.Berau	Terpenuhinya penerangan jalan umum di wilayah tanjung redeb	Program oprasional dan pemeliharaan ketanagalistrikan.	12 Bulan	12 Bln	100 %
11	Terwujudnya peningkatan sarana aparatur lalu lintas	Adanya peningkatan sarana aparatur lalu lintas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Keg	1 Keg	100%

Detail/rician tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih terinci pada matrik pengukuran kinerja dalam lampiran 2.

➤ **Capaian Indikator Sasaran**

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Indikator Sasaran RENSTRA Tahun 2017

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator		Capaian 2017	% Capaian	% T.Akhir
				2019	2021	2018	2018	2021
1	Meningkatkan jangkauan transportasi	teraksesnya wilayah terpencil	Jumlah desa yang belum terlayani transportasi darat dan SDP (jumlah kecamatan)	4	1	4	0	0
		teraksesnya pusat ekonomi dan pariwisata	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1,140,523	1,455,629			
			Jumlah orang melalui					
2	Meningkatkan keselamatan dan keamanan Lalu Lintas dan angkutan	Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi	Tingkat kecelakaan angkutan darat	43	12			

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab -sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.



Hingga akhir tahun/periode 2018 tahun ke 3 (Tiga) RPJMD 2016-2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Berau secara bertahap dan konsisten berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya. Hal diwujudkan melalui 11(sebelas) sasaran strategis dan 11 (Sebelas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang didalamnya masih termasuk bidang sebagaimana nomenklatur dan tupoksi SKPD terdahulu. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGI 1 :

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sasaran strategi 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi **“Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan”** karena dengan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit internal dinas Perhubungan diharapkan mutu pelayanan publik juga menjadi lebih baik.

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2018		Target Akhir RENSTRA (2021)	Capaian TAHUN 2018	Capaian T.Akhir RENSTRA 2021
	Target	Realisasi			
1	3		4	5	
Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani Sosialisasi SKPD	6	6	13	100%	61.54%

Dari kegiatan pendukung sasaran ini hal-hal yang diperoleh atau dapat dirasakan manfaatnya oleh aparatur Dinas perhubungan meliputi, tertibnya administrasi pendukung perkantoran, tersedianya peralatan & perlengkapan kantor sekaligus dirasakan manfaatnya untuk mendukung proses kerja. Untuk kenyamanan lingkungan kerja telah dilakukan pemeliharaan gedung kantor. Proses pengadaan barang dan jasa program dan kegiatan pendukung kebanyakan dilakukan dengan metode pengadaan langsung dan swakelola. Kelancaran dan bahkan keterlambatan masing-masing pekerjaan terkadang terjadi karena proses pemilihan penyedia barang/jasa.

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Proses Pengadaan Barang/Jasa direspon secara cepat oleh pengelola kegiatan.
- Administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dituntut setiap bulan

❖ **Hambatan atau masalah :**

- Mundurnya pelaksanaan beberapa kegiatan, sehingga perlu penjadwalan ulang.



- Tidak ada stok barang habis pakai di kantor, sehingga sering kali kebutuhan seperti ATK dan bahan pembersih terlambat penyediaannya. Dan tidak dapat terkontrol secara baik.

❖ **Strategi Upaya Pemecahan Masalah :**

- Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan progres fisik
- Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah- sangat rendah
- Sebaiknya untuk barang habis pakai seperti ATK dan bahan pembersih di stok oleh bagian penyimpan barang, sehingga dapat terkontrol penggunaannya.

SASARAN STRATEGI 2 :

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran strategi 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi **“Meningkatkan kualitas SDM pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Berau”** dan juga tujuan **“Memaksimalkan atau mengoptimalkan mutu layanan di bidang perhubungan, ”**. Berikut pengukuran capaian sasaran 2 tahun 2018 :

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran 2

Indikator Kinerja	Tahun 2018		Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian tahun 2018%	Capaian T. Akhir 2021%
	Target	Realisasi			
-1	-2	-3	-4	-5	
Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan/Diklat/Sosialisasi/Magang	20	12	-	99 %	-

Terlihat dari tabel 3.5 capaian indikator kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 99% , hal ini cukup baik yang meningkat dari tahun 2017 yang tersusun setiap tahunnya dalam peningkatan susunan kegiatan diklat perhubungan darat.

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Informasi penyelenggaraan diklat/bimtek yang mudah diakses
- Adanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat.

❖ **Hambatan atau masalah :**

- Bimbingan Teknis khususnya untuk keahlian dibidang perhubungan sering kali tidak dapat diikuti karena adanya beberapa persyaratan bahwa peserta diklat harus memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan tertentu.



- Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis bidang perhubungan dimutasi ke SKPD lain.
- Terbatasnya jumlah aparatur & anggaran untuk kegiatan studi banding / magang
- Dari total capaian jumlah tenaga teknis bidang perhubungan masih sangat minim.

❖ **Strategi Upaya Pemecahan Masalah :**

- Penyusunan Data analisa kebutuhan tenaga teknis SDM secara menyeluruh sehingga dapat dibuka kesempatan untuk mengikuti studi banding / magang yang diikuti penambahan anggaran.
- Hambatan bahwa peserta diklat harus memiliki kopetensi dan latar belakang pendidikan tertentu dapat diatasi dengan mengikuti diklat-diklat tingkat dasar bidang perhubungan.
- Untuk masalah mutasi pegawai yang telah memiliki kompetensi teknis dibidang perhubungan, dapat dilakukan dengan koordinasi ke BKPP Kab.Berau.
- Diklat-diklat teknis yang memerlukan kualifikasi khusus disusun tersendiri terpisah dari kegiatan Bimbingan Teknis Rutin sehingga memungkinkan penambahan jumlah anggaran untuk biaya diklat teknis
- Diklat teknis dilaksanakan di daerah sehingga jumlah pegawai yang ikut diklat bisa lebih banyak.

SASARAN STRATEGI 4 :

Terwujudnya dan terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas dermaga di Kab Berau.

Sasaran strategi 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi **“Menyediakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana perhubungan.”**

juga digunakan untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan kemudahan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas bagi masyarakat.”**. Berikut *pengukuran capaian sasaran 4* :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran 4

Indikator Kinerja	Tahun 2018		Target Akhir RENSTRA (2021)	Capaian TH.2018 %	Capaian Akhir RENSTRA 2021
	Target	Realisasi			
Jumlah Pelabuhan/dermaga yang dibangun/ditingkatkan/direhab	3	3	55	98 %	64.5%

Sasaran 4 ini berkaitan dengan program pembangunan daerah kabupaten Berau tahun 2018-2021 dengan tujuan/sasaran **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata”**, strategi **“Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk wisata”**, arah kebijakan **“Pembangunan dan Pengembangan Wisata Bahari , wisata Alam, dan Wisata Perkotaan”** dengan indikator kinerja yang sama. Data awal jumlah pelabuhan/dermaga yang dibangun/ditingkatkan/direhab pada tahun 2018 adalah 41 (empat puluh satu) unit, data ini diperoleh dari akumulasi jumlah pelabuhan/dermaga yang dibangun/ditingkatkan/direhab dari tahun 2010 s/d 2018 .

Target akhir Renstra SKPD/OPD pada tahun 2021 adalah 55 (lima puluh lima) unit.

Tahun 2018 jumlah target Pelabuhan ditingkatkan/direhab di Kabupaten Berau sebanyak 3 (tiga) unit, yang terletak di 3 (Tiga) Kecamatan, yaitu 1 (satu) unit dermaga di Kecamatan Gunung Tabur, 1 (satu) unit Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb, 2 (dua) unit di Kecamatan Tanjung Redeb, Capaian/realisasi dermaga yang ditingkatkan/direhab pada Tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) unit, dengan demikian capaian indikator kinerja pada Tahun 2018 sebesar 98 %.

Pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakanlah program Program Pembangunan prasanana dan fasilitas perhubungan. dengan kegiatan pendukung program sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Fasilitas Sungai, Danau dan Penyebrangan yang terdiri dari Peningkatan Dermaga di Kecamatan Tanjung Redeb, dengan capaian kegiatan 100%.

Gambar 3.1 Dokumentasi Peningkatan Dermaga X Pasar Gayam.



Hasil yang dapat dinikmati masyarakat dari seluruh kegiatan yang terlaksana Antara lain aktifitas penyebrangan menjadi lebih nyaman, aktifitas nelayan seperti tambat labuh kapal dan bongkar muat hasil tangkapan nelayan menjadi lebih mudah dan lancar.

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Proses Pengadministrasian Kegiatan Pendukung (Rutin) & Bidang Diusahakan Tepat Waktu
- Berjalannya Pengawasan dan Evaluasi yang intens ke lapangan
- Terjalannya komunikasi yang baik antara atasan, bawahan dan mitra kerja
- Munculnya kesepahaman dan upaya sinergitas yang baik antar stake holder dalam menyikapi permasalahan di Kabupaten Berau.

❖ **Hambatan atau masalah :**

- Proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang lama karena proses gagal lelang sehingga proses diulang dan lainnya.
- Pelaksanaan lelang khususnya material kayu (ulin) mengalami keterlambatan karena Pengelola Kegiatan memerlukan waktu dalam mengkoordinasikan berkenaan dengan administrasi dokumen lelang agar sesuai dgn ketentuan



- Penyelesaian pekerjaan rata-rata terfokus pada semester 4 (empat).

❖ **Strategi Upaya Pemecahan Masalah :**

- Serapan input/anggaran yang belum maksimal dapat diminimalisasi dengan perencanaan yang matang dari masing-masing bidang pada proses pengusulan/penetapan anggaran selain itu untuk pekerjaan fisik perlu adanya tinjauan lapangan.
- Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel dan bebas KKN.
- Agar pihak pengelola masing-masing kegiatan dapat mengawasi penyedia secara teliti dan selalu berpatokan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan. Sehingga tidak ada tahapan yang pelaksanaannya terlambat.

SASARAN STRATEGI 9:
Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor..

Sasaran strategi 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi **“Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan”** juga digunakan untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan upaya-upaya peningkatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan”**. Berikut pengukuran capaian sasaran 9 :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Sasaran 9

Indikator Kinerja	Tahun 2017		Capaian %
	Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Jumlah kendaraan yang diuji	5000	6064	136%

Gambar 3. 2 Proses Pengujian Kendaraan Bermotor



❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Kesadaran pengguna jasa bidang perhubungan akan kewajiban mereka kepada Pemda Kabupaten Berau



- Kinerja dan perilaku yang baik dari aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik
- Sistem administrasi, SP, dan SOP yang terus dibenahi secara berkesinambungan.
- Kenyamanan dan kebersihan pada unit pelayanan publik yang tersedia.

❖ **Hambatan atau masalah :**

- Perlunya peningkatan prasarana disetiap unit pelayanan, agar pelayanan tidak dilakukan secara manual.
- Terbatasnya kualitas SDM pelayanan publik.

❖ **Strategi Upaya Pemecahan Masalah :**

- Identifikasi kebutuhan prasarana disetiap unit pelayanan, selanjutnya agar dapat diusulkan prasarana yang memadai dan berbasis teknologi untuk Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga pelayanan dapat lebih cepat, akurat dan sesuai prosedur.
- Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik dengan mengikuti bimtek, magang, diklat ataupun orintasi lapangan.

SASARAN STRATEGI 8:

Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas

Sasaran strategi 8 ini merupakan salah satu upaya **“Mewujudkan upaya-upaya peningkatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan”** Berikut pengukuran capaian sasaran 8 :

Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Sasaran 8

Indikator Kinerja			Target 2018	Realisasi 2018	Capaian
Jumlah	Rambu-Rambu	Lalu Lintas	3	3	100%

Indikator **“Frekwensi pengendalian dan pengamanan Lalu lintas dalam satu tahun”** dengan capaian diatas 100%. Capaian ini didukung dengan kegiatan perbantuan dalam rangka pengamanan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas lapangan.

Hasil/output dari kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat berupa rambu lalu lintas tunggal jumlah 44 Jenis, marka, zebra cross yang letaknya tersebar di kecamatan Tanjung Redeb.

Gambar 3.3 Jenis-jenis Rambu Lalu Linta







C. REALISASI KEUANGAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran TA.2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Capaian Realisasi	% Realisasi	Pagu/Target (Rp.1000)	Realisasi (Rp.1000)	% Realisasi
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	Program Pelayanan Administrasi perkantoran.	15	15	100%	3.973.914	3.320.097	85.68%
2	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya ASN yang berkualitas dan memiliki kinerja yang tepat sasaran	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4	4	100%	50.000	44.500	89.00%
			Pendidikan Dasar Bidang Perhubungan Darat	10	15	100%	50.000	49.901	99.80 %
3	Adanya Capaian Laporan Kinerja Dinas	Jumlah Laporan yang dibuat setiap tahunnya	Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	3	100%	5.000	5.000	100%



	Perhubungan Setiap Tahun		Monitoring dan Evaluasi	1	1	100%	175.000	168.000	96.10%
4	Terwujudnya dan terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas dermaga di Kab Berau.	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan di Rehabilitasi	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.						
			Pembangunan sarana dan fasilitas sungai,danau dan penyebrangan	1	1	100%	2.500.000	2.430.804	97.23 %
			Pembangunan sarana dan fasilitas pelabuhan dermaga	2	2	100 %	1.230.000	1.206.171	98.06%
5	Terwujudnya pemeliharaan dan rehabilitasi untuk fasilitas LLAJ	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan yang dapat ditingkatkan Setelah hijau blm dikerjakan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ .						
			Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	4	4	100%	974.522	415.117	42.60%
			Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ	3	3	100%	270.000	223.263	82.69%
			Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light/ ATCS	14	14	100%	1.080.000	1.043.443	96.62%
6	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas.	Rasio cakupan pelayanan keselamatan lalu lintas.	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.						
			Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan	2	2	100%	220.802	216.406	98.01%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan LLAJ	6	6	100%	515.050	416.180	80.80%
			Rehabilitasi /pemeliharaan Traffc light	1	1	100%	200.000	181.515	90.76%
			Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.	3	3	100%	400.000	350.150	87.54%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Capaian Realisasi	% Realisasi	Pagu/Target (Rp.1000)	Realisasi (Rp.1000)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Terhujudnya peningkatan pelayanan angkutan dan keselamatan lalu lintas.	Rasio cakupan pelayanan angkutan dan keselamatan lalu lintas.	Program peningkatan pelayanan.	100%	100%	100%	220,000	197,981	90%
			kegiatan pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya.	3	3	100%	612.814	570.484	93.09%
			Sosialisasi /penguluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.	70	70	100%	85.000	81.817	96.26%
			Kegiatan wahana tata ngraha(WTN)	1	1	100%	150.000	124.261	82.84%
			Kegiatan pemilihan pelajaran pelopor keselamatan lalu lintas.	3	3	100%	150.000	122.020	81.35%
			Sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar dan generasi muda.	7	7	100%	150.000	124.574	83.05%
			Forum lalu lintas dan angkutan jalan.	1	1	50%	176.686	121.990	69.04%
			Sosialisasi /penyuluhan /Pembinaan keselamatan pelayanan.	100	100	100%	200.000	195.539	97.77%
			Operasional dan pemeliharaan UPTD Dermaga maratua	12	12	100%	295.000	272.380	92.33%
			Pengadaan modal transportasi darat (DAK)	5	5	10%	2.945.765	41.760	1.42%
			Kegiatan penertiban /penegakan hukum perizinan oprasi angkutan ,dimensi dan muatan lebih kendaraan bermotor di jalan.	3	3	100%	100.000	95.618	95.62%



8	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Terwujudnya capain pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	100%	100%	100%	735,951	573,046	78%
		Jumlah rekomendasi, koordinasi dan tindakan lapangan	Peresmian bandara maratua	1	1	10%	500.000	71.980	14.40%
		Pastisipasi kegiatan WTN	-Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Ya	Ya	Ya	150,000	87,407	58%
		Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi "Pelajar Pelopor"	-Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	50	45	90%	174,600	134,608.18	77%
		Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas	-Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Bagi Pelajar dan Generasi Muda	7	9	129%	129,501	119,151	92%
9	Terwujudnya peningkatan kualitas rambu lalu lintas dan alat keselamatan lalu lintas.	Terwujudnya pengadaaan rambu isyarat lalu lintas dan alat keselamatan lalu lintas	Program pengendalian dan pengamana lalau lintas.	6	6	100%	145,275	143,205.01	99%
			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	3	3	100%	550.000	458.373	83.34%
			Pengadaan alat-alat keselamatan dan keamanan lalu lintas	1	1	100%	208.000	204.837	98.48%
10	Terwujudnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kab, Berau.	Adanya alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualitas standart yang dibutuhkan.	Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor.						
			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.	3	3	100%	670.000	0.00	0.0%
11	Terwujudnya pemeliharaan penerangan jalan umum di Kab, Berau..	Terpenuhinya penerangan jalan umum di wilayah tanjung redeb.	Program oprasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan.						
			Oprasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan.	12	12	100%	503.765	463.826	92.07%





Anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan, berikut uraiannya :

1. Realisasi Belanja Operasi

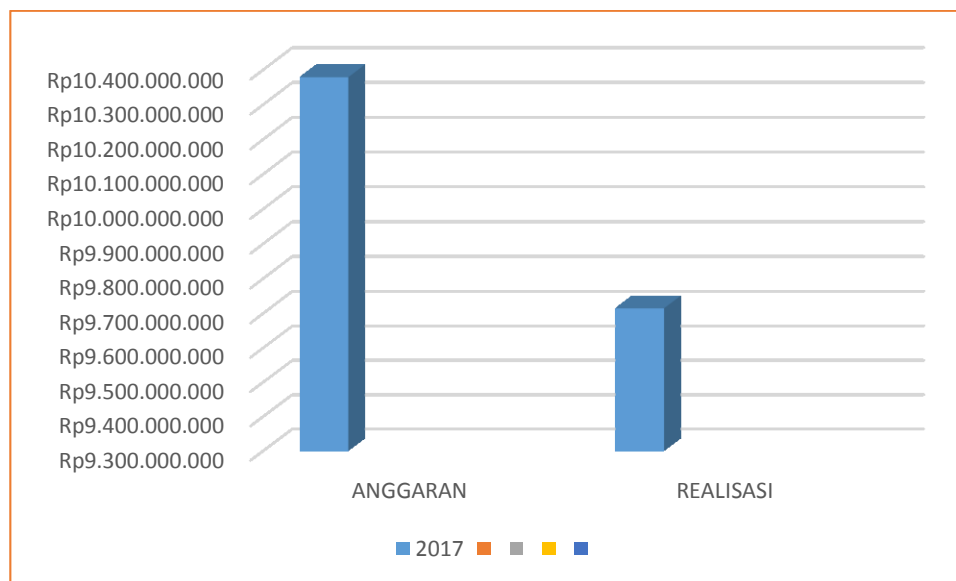
Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang. Jumlah anggaran Belanja pegawai sebesar Rp. 10.378.610.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 9.714.367.415 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah), atau sebesar 93.60%. Berikut perbandingan pagu anggaran, realisasi dan persentase belanja tidak langsung tahun 2017.

TABEL 3.11 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TH 2017

No	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2017	Rp 10.378.610.000	Rp 9.714.367.415	93,60%

Pagu anggaran untuk belanja pegawai dari tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini selaras dengan adanya rasionalisasi anggaran di Kabupaten Berau.

Gambar 3.20 GRAFIK Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017



Anggaran belanja barang dan jasa, Dinas Perhubungan Tahun 2017 sebesar Rp.9.409.051.000 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), anggaran tersebut dapat terserap/terrealisasi sebesar Rp.4.634.539.245 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 49.26%.



2. Realisasi Belanja Modal

Belanja modal (belanja langsung) terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi & jaringan dan belanja asset tetap lainnya. Total anggaran belanja modal sebesar Rp. 3.439.785.000 (Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.827.083.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 53.12 %.Berikut perbandingan realisasi anggaran belanja modal Tahun 2017.

TABEL 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2017

No	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2016	Rp 26.465.670.000	Rp 25.843.292.090	97,65%
2	2017	Rp 15.095.146.000	Rp 8.505.723.745	56.35%

3. REALISASI TARGET PENDAPPATAN ASLI DAERAH/PAD

TABEL 3.13 Realisasi Target PAD

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET	TOTAL	%
1	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	Rp 660.500.000	Rp. 613.296.000	140, %
2	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp. 314.000.000	Rp. 315.075.000	142.9%
3	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	Rp. 378.500.000	Rp. 283.104.665	105%
4	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	Rp. 24.000.000	Rp.14.800.000	50%
5	SUMBANGAN PT. PELINDO	Rp -	Rp. 312.120.000	
	JUMLAH TOTAL	Rp. 1.377.000.000	Rp. 1.615.717.185	119.6%

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Target terdiri dari 5 jenis retribusi yaitu Retribusi parkir di tepi jalan umum, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi izin trayek. Rata-rata pencapaian retribusi telah memenuhi target yang ditentukan yaitu sebesar 119.6%,



D. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Berau tidak mendapatkan penghargaan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi satuan kerja perangkat daerah/organisasi perangkat daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Laporan Kinerja juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi sebagai wakil pemerintah dibidang perhubungan.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai pencapaian tahun pelaporan (2018) dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Berau pada tahun 2018 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan, RKPD 2018, dan mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Sistem pengendalian tugas pokok dan fungsi dan program/kegiatan dilakukan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan, untuk pelaporan kinerja baik bulanan, triwulanan dan semester yang bisa diakses publik melalui website SMEP Online dan TEPPRA adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perhubungan kedepan. Pertama, walaupun sebagian besar indikator sasaran telah mencapai target seratus persen ataupun diatas seratus persen, persoalan-persoalan baik intern dan antar SKPD belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi keterbatasan aparatur yang memiliki kualifikasi teknis sehingga menimbulkan kinerja beberapa bidang kurang maksimal.



Terakhir sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bagian sekeretariat, bidang-bidang dan upgd di lingkungan dinas Perhubungan Kabupaten Berau untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan SKPD. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tanjung Redeb, 09 Februari 2019



LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

RKT (RENCANA KINERJA TAHUNAN) TAHUN 2018

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018